

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	005/SKIPM.GTO/PPID/III/2024
	Tgl Pembuatan	10 Januari 2023
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	1 Februari 2023
	Disahkan oleh	<p>Stasiun i Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo</p>  <p>Abdul Kadir, S.Pi., M.Si NIP. 19730302 199903 1 003</p>
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN		
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO		Judul SOP
		Uji Konsek uensi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28		1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		3. Mempunyai <i>communication skill</i>
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 /PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		4. Kemampuan pendokumentasian Informasi
5. Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KKP		
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)		
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik		
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan KKP		
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang PPID Di Lingkungan KKP		
10. Keputusan Kepala BKIPM No. 142/KEP-BKIPM TENTANG Daftar Informasi Publik dan Daftar Infprmasi Yang Dikecualikan di SKIPM		
11. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
12. Surat Tugas Nomor 005/SKIPM.GTO/PPID/III/2024 tentang Tim PPID SKIPM Gorontalo		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		1. Komputer
2. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan		2. Instrumen Kerja
3. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		3. ATK
		4. Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
		1. Daftar Pemohon
		2. Buku Tamu

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PPID BKIPM Ambon	Kepala BKIPM Ambon	PPID Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP	Mulai			dokumen informasi publik, peraturan perUUan	3 hari	konsep kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				konsep kajian	1 hari	rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup	Selesai			dokumen informasi publik, peraturan perUUan	1 hari	surat penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan			Selesai	Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID	

